

RENCANA KERJA TAHUN 2020



PEMERINTAH KOTA BEKASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 1 – MEDAN SATRIA
KOTA BEKASI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	3
1.3 Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi Renja	5
1.4 Sistematika	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	53

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyuluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengimplementasikan apa yang telah digariskan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan pencapaian target kinerja pelayanan terhadap masyarakat dari tahun sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bekasi.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih belum maksimal dalam mencapai sasaran, hal ini akan di jadikan bahan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, mudah- mudahan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 ini dapat di pergunakan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada masa yang akan datang.


KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Drs. ABI HURAIKHAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660103 198603 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib.

Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah kota Bekasi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok memelihara ketentraman, ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi dari masing-masing SKPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil Renja SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum akhirnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mempedomani Visi Misi, Program Prioritas Wali Kota/Wakil Wali Kota periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN
IHSAN**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota terpilih periode 2018-2023 penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum terdapat dalam Misi ke-5 (lima) yaitu **“Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”**.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyuluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan

tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) diharuskan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, setiap SKPD juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD sesuai ketentuan dalam pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004.

Atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengimplementasikan apa yang telah digariskan dalam RKPD dalam rangka meningkatkan pencapaian target kinerja pelayanan terhadap masyarakat dari tahun sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bekasi.

Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Bekasi disusun berpedoman kepada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 , No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
- 2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 No.125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 ;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Pertanggung Jawaban, Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Terhadap Masyarakat.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Daerah Pasal 1 Ayat 3.
 - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 13) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
 - 14) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi.
 - 15) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018;
 - 16) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bekasi.

B. Tujuan

- 1) Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satpol PP yang telah disusun sebelumnya yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan;

- 2) Menciptakan sinergitas Perencanaan secara berkesinambungan antara berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan .

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) menggambarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan. Bab ini menggambarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.

4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
5. Bab 5 (lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel 2.1 hasil pengukuran indikator kinerja program dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Target indikator Kinerja Program Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas pada tahun 2018 target berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis sebesar 15 %, tingkat capaian target tersebut dilaksanakan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi hanya sebagai penunjang atau pendukung kegiatan peningkatan deteksi dini.
2. Target Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 pada tahun 2018 sebesar 13 % tercapai sebesar 15%, hal ini berdasarkan data Jumlah pelanggaran pada kondisi awal sebanyak 1602, tahun 2018 jumlah pelanggaran perda 1359, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mampu mengurangi tingkat pelanggaran perda K-3 di Kota Bekasi sebesar 15 % **BERHASIL**
3. Target Persentase Pos Siskamplang yang berfungsi pada tahun 2018 sebesar 80 % tercapai sebesar 100 %, hal ini berdasarkan data Pos Kamling yang berfungsi dari 124 pos

siskamling, seluruhnya masih berfungsi dan digunakan dalam menjaga keamanan lingkungan. **BERHASIL**

4. Target Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas pada tahun 2018 sebesar 7 % tercapai 12.12 %, hal ini berdasarkan data pada tahun 2017 pelanggaran gangguan kamtrantibmas sebesar 2580 pelanggaran, pada tahun 2018 terjadi pelanggaran gangguan kamtrantibmas sebesar 1397 atau terjadi penurunan pelanggaran gangguan kamtrantibmas sebesar 12.12 % **BERHASIL**
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada tahun 2018 Target indikator Kinerja berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis adalah Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100 %, tingkat capaian target 82.26 % dengan predikat **BERHASIL**
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2018 dengan target indikator kinerja Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100 % tercapai sebesar 57,04% dengan predikat **CUKUP BERHASIL**
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2018 dengan target indikator Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 0 % tercapai sebesar 00.00 %, dengan predikat **BERHASIL**
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun 2018 dengan target indikator Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 0 % tercapai sebesar 00,00 %, dengan predikat **BERHASIL**
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2018 dengan target indikator Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100 % tercapai sebesar 74,61 %, dengan predikat **BERHASIL**

Berikut tabel tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2017 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (s.d Agustus 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)	Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05.02.16	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas	15	15	15	10	66,67	15	40	2,67
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3	13	20,92	12	8	66,67	13	41,92	3,49

		Persentase Pos Siskamling yang berfungsi	80	100	80	53	66,25	80	233	2,91
		Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas	7	12,12	7	5	71,43	7	24,12	3,45
5.2.16.01	Peningkatan Kinerja Anggota Satlinmas Kota Bekasi	tersedianya Honor dan Beras Bagi Anggota Satlinmas	12	8	8	6	75,00	8	22	183,33
		Terselenggaranya Pembinaan Anggota Satlinmas	1736	1736	1736	1041	59,97	1736	4513	259,97
		Tersusunnya Laporan Bulanan Kinerja Anggota Satlinmas	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67
5.2.16.02	Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah/PILKAD A dan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Proses Pengamanan PILKADA dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota	3476	0	3476	80	2,30	3476	3556	102,30

	Tahun 2018									
5.2.16.03	Penyelenggaraan Hari Satpol dan Linmas	Partisipasi kegiatan HUT Satpol Tk. Provinsi	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
		HUT Satpol dan Linmas	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
5.2.16.05	Operasi Gabungan Penertiban K3	Penertiban PKL	20	20	20	15	75,00	20	55	275,00
		Penertiban spanduk/reklame liar	14	14	14	9	64,29	14	37	264,29
		Penertiban THPP	15	15	15	9	60,00	15	39	260,00
		Penertiban GDN	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67
		Penertiban becak	8	8	8	4	50,00	8	20	250,00
		Pelaksanaan Tipiring	5	5	5	0	0,00	5	10	200,00
		Pengawasan Trantibum	10	10	10	6	60,00	10	26	260,00
5.2.16.06	Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS	Tersusunnya Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan	1	1	1	0	0,00	1	2	200,00

		Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS								
5.2.16.07	Perbantuan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana	Kegiatan perbantuan Satlinmas	16	16	16	5	31,25	16	37	231,25
		Perahu Karet	2	2	2	2	100,00	2	6	300,00
5.2.16.08	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Pengamanan hari besar nasional dan keagamaan	35	35	35	24	68,57	35	94	268,57
5.2.16.09	Penertiban penyakit masyarakat (PEKAT)	Penertiban PSK	15	15	15	8	53,33	15	38	253,33
		Pengiriman hasil penertiban PSK	8	8	8	4	50,00	8	20	250,00
		Penertiban PMKS	10	10	10	5	50,00	10	25	250,00
		Pasca penertiban PMKS	8	8	8	3	37,50	8	19	237,50
5.2.16.10	Pengamanan Unjuk Rasa	Pengamanan Unjuk rasa	30	30	30	15	50,00	30	75	250,00
5.2.16.11	Pengamanan Car Free Day	Pengamanan Car Free Day	39	39	39	32	82,05	39	110	282,05

	Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Satlinmas	Jumlah stell seragam satlinmas	1736	1736	0	0	0,00	0	1736	100,00
	Sertifikasi Anggota Satpol PP Kota Bekasi	Jumlah aparatur satpol yang mengikuti sertifikasi fungsional Satpol	50	50	0	0	0,00	0	50	100,00
	Pengadaan Poster Himbauan K3	Tersediannya poster himbauan K3	500	500	0	0	0,00	0	500	100,00
	Pengadaan Papan Himbauan di Pos Siskamling	Tersediannya papan himbauan di poskamling	40	40	0	0	0,00	0	40	100,00
	Revitalisasi Alat Komunikasi Satlinmas	Tersediannya radio komunikasi	35	35	0	0	0,00	0	35	100,00
	Pengadaan Stiker Himbauan Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan di Kota Bekasi	Tersediannya stiker himbauan menjaga trantibumas	936	936	0	0	0,00	0	936	100,00

	Kajian Pelaksanaan Pencegahan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Kota Bekasi	Jumlah dokumen kajian pelaksanaan pencegahan penyakit masyarakat di Kota Bekasi	1	1	0	0	0,00	0	1	100,00
	Kajian Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen kajian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	1	0	0	0,00	0	1	100,00
	Pelatihan Kesamaptaan Bagi Satpol PP	Jumlah aparaturnya yang mengikuti jambore dan kesemaptaan Satpol PP	60	60	0	0	0,00	0	60	100,00
05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100			52,79		100	100,00
5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon Kantor	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67

5.2.01.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Line Internet	24	24	24	16	66,67	24	64	266,67
5.2.01.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan/perengkapan kebersihan	27	27	27	17	62,96	27	71	262,96
5.2.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	69	69	69	69	100,00	69	207	300,00
5.2.01.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	19	19	19	19	100,00	19	57	300,00
		Kalender	1000	1000	1000	0	0,00	1000	2000	200,00
		Kartu Parkir	1150	1150	1150	1150	100,00	1150	3450	300,00
5.2.01.15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Stop kontak/fitting listrik	10	10	10	5	50,00	10	25	250,00
		Kabel roll	2	2	2	1	50,00	2	5	250,00
		Saklar lampu	9	9	9	3	33,33	9	21	233,33
		Fitting lampu	10	10	10	4	40,00	10	24	240,00
		Pipa listrik	15	15	15	0	0,00	15	30	200,00
		Lampu TL	30	30	30	14	46,67	30	74	246,67

5.2.01.17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar skala lokal	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67
		Surat kabar skala nasional	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67
		Buku saku	300	300	300		0,00	300	600	200,00
5.2.01.18	Penyediaan Makanan dan Minuman	makan minum harian pegawai	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67
		makan minum rapat	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67
5.2.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	160	160	160	90	56,25	160	410	256,25
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250	250	250	150	60,00	250	650	260,00
5.2.01.22	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	tenaga administrasi perkantoran	6600	6600	6600	4400	66,67	6600	17600	266,67
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Advetorian surat kabar	7	7	7	5	71,43	7	19	271,43

		Talkshow interaktif radio	7	7	7	2	28,57	7	16	228,57
		Website	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67
5.2.01.27	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	piket pamdal malam hari	244	244	244	147	60,25	244	635	260,25
		piket pamdal hari libur	100	100	100	60	60,00	100	260	260,00
		piket pamdal hari libur nasional	21	21	21	13	61,90	21	55	261,90
		piket patroli hari libur	100	100	100	60	60,00	100	260	260,00
		piket patroli hari libur nasional	21	21	21	13	61,90	21	55	261,90
5.2.01.31	Penataan Arsip	Filling kabinet 4 laci	6	6	6	0	0,00	6	12	200,00
		Lemari Arsip 2 pintu sliding kaca plat besi	5	5	5	0	0,00	5	10	200,00
05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	100		2791	67,51		2891	267,51
5.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BBM Kendaraan Dinas Esselon	4230	4230	4230	2791	65,98	4230	11251	265,98
		BBM	75230	75230	75230	49651	66,00	75230	200111	266,00

		Kendaraan Dinas Patroli								
		Jasa Service kendaraan dinas Esselon/Pejabat	17	17	17	12	70,59	17	46	270,59
		Jasa Service kendaraan dinas Patroli	48	48	48	32	66,67	48	128	266,67
		Suku cadang kendaraan dinas eselon/pejabat	17	17	17	12	70,59	17	46	270,59
		Suku cadang kendaraan dinas patroli	48	48	48	32	66,67	48	128	266,67
		Surat Tanda Nomor Kendaraan yang berlaku	65	65	65	43	66,15	65	173	266,15
5.2.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan peralatan gedung Kantor SATPOL PP Kota Bekasi	89	89	89	60	67,42	89	238	267,42
	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meja kerja staff (unit)		6	6					
		Tersedianya kursi Kerja		9	9					

		Staff (unit)								
		Tersedianya Sofa (unit)		1	1					
		Tersedianya kursi ruang rapat (unit)		13	13					
		Tersedianya kursi rapat pejabat (unit)		5	5					
05.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100	100			0,00			200,00
5.2.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Baju adat daerah	100	100	100	0	0,00	100	200	200,00
		Rompi Unit Reaksi Cepat	260	260	260	0	0,00	260	520	200,00
5.2.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Pakaian olahraga	869	869	869	0	0,00	869	1738	200,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pembawa PATAKA (Stell)	13	13	13	0	0	0	13	100,00
		Tersedianya pakaian dinas lapangan beserta perlengkapan	700	0	0	0	0	0	0	0,00

		nya (stell)								
		Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya (stell)	100	100	100	0	0	0	100	100,00
		Tersedianya pakaian dinas Upacara beserta perlengkapannya (stell)	20	20	20	0	0	0	20	100,00
05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	100			0,00			200,00
5.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4	4	4	0	0,00	4	8	200,00
5.2.05.03	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek aparatur	5	5	5	0	0,00	5	10	200,00
5.2.05.13	Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur	Peserta Pelatihan Dasar Deteksi Dini	32	32	32	0	0,00	32	64	200,00

		Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Administrasi Kantor	30	30	30	0	0,00	30	60	200,00
05.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	100			71,30			271,30
5.2.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan sakiP	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
		Laporan LKPJ	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
		Laporan e-monev	4	4	4	3	75,00	4	11	275,00
		Laporan simonteptra	4	4	4	3	75,00	4	11	275,00
5.2.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan bulanan keuangan	12	12	12	8	66,67	12	32	266,67
		Laporan triwulan keuangan	4	4	4	3	75,00	4	11	275,00

		Laporan semester keuangan	2	2	2	1	50,00	2	5	250,00
		Laporan tahunan keuangan	1	1	1	0	0,00	1	2	200,00
5.2.06.08	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja	Buku rencana kerja tahun 2019	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2018 tidak dilaksanakan kembali di tahun 2019 dikarenakan kegiatan tersebut sudah mencapai hasil yang diharapkan sehingga tidak dianggarkan kembali di tahun 2018 ataupun di tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih dibawah 50%. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan dimana seharusnya dilaksanakan di Triwulan III, dijadwalkan kembali di Triwulan IV dikarenakan adanya efisiensi/perubahan rencana realisasi anggaran sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Gaji, Tunjangan Daerah, dan Tunjangan Pegawai Berbasis Kinerja Perangkat Daerah) adalah sebesar Rp. 18.579.746.557,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.298.500.000,- atau 39.%

B. Belanja Langsung Penunjang Urusan

Belanja Langsung Penunjang Urusan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.043.645.000,- telah mencapai realisasi sebesar Rp. 1.062.855.430,- atau 71.55 % dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 27.548.645.000,- telah tercapai realisasi anggaran Rp. 20.756.803.049,- atau sebesar 75.35 % terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar 38.26 % . Hal ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi sebesar 86.14%
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi sebesar 98.39 %
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan realisasi sebesar 50.37 %, hal ini dikarenakan ada beberapa item pengadaan yang penyerapan anggarannya dilakukan di Triwulan IV
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi anggaran sebesar 76.92 %
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar 13.27%, hal ini

dikarenakan adanya kebijakan pembatasan penyerapan anggaran.

7. Penyediaan Makan dan Minuman dengan realisasi sebesar 21.81%, sisa anggaran diserap di triwulan IV
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan realisasi sebesar 57.09%
9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran dengan realisasi sebesar 77.36%
10. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar 15.57%
11. Penyediaan jasa keamanan kantor dengan realisasi anggaran 60.68%
12. Penataan Arsip, realisasi anggaran sebesar 0%, dikarenakan alokasi anggaran terdapat di triwulan IV

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini telah terealisasi sebesar 42.33% yaitu sebesar Rp. 740.855.650,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000,- dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi sebesar 43.16%
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan realisasi sebesar 28.76%

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dari pagu sebesar Rp. 365.000.000, realisasi anggaran sebesar 0 %, dikarenakan alokasi anggaran di Triwulan IV

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dari pagu sebesar Rp. 290.000.000, realisasi anggaran sebesar 0 %, dikarenakan alokasi anggaran di Triwulan IV

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dari pagu sebesar Rp. 90.000.000,- realisasi anggaran sebesar 22.62 %, terdiri dari kegiatan :
sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebesar 54.33 %
2. Penyusunan Laporan Keuangan, realisasi anggaran sebesar 13.52%
3. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja, realisasi anggaran 0% mengalami prgeseran jadwal menjadi Triwulan IV.

C. Belanja Langsung Urusan

Belanja Langsung Urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menjalankan program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Pagu anggaran 15.624.134.500, realisasi anggaran sebesar 6.729.462.000, atau 43.07 %, terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Anggota Satlinmas Kota Bekasi, realisasi anggaran sebesar 61.28%
2. Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah/PILKADA dan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, realiasai anggaran sebesar 13.58 %, hal ini dikarenakan adanya pergersaran anggaran, sehingga baru bisa direalisasikan di triwulan IV
3. Penyelenggaraan Hari Satpol dan Linmas, realiasasi anggaran sebesar 96.43%
4. Operasi Gabungan Penertiban K3, realisasi anggaran sebesar 0%, namun demikian pelaksaaan capaian kinerja sebesar 60%

5. Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS, realisasi anggaran 1.08%, namun demikian kegiatan sudah dilaksanakan sebesar 50%
6. Perbantuan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana, realisasi anggaran sebesar 50.47%.
7. Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, realisasi anggaran sebesar 26.31%
8. Penertiban penyakit masyarakat (PEKAT), realisasi anggaran sebesar 0.47%, namun demikian kegiatan sudah dilaksanakan sebesar 64%
9. Pengamanan Unjuk Rasa, realisasi anggaran sebesar 24.50%
10. Pengamanan Car Free Day, realisasi anggaran sebesar 20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan indikator Kinerja dan Target Pada Tahun 2018 yang terdiri dari :

1. Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas,
Target capaian kinerja pada tahun 2016 tercapai 15 %, tahun 2017 15% dan Tahun 2018 data pada Bidang Kesbangpol Kota Bekasi
2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3
3. Persentase Pos Siskamling yang berfungsi
4. Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			KETERANGAN
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas				15	15	15	15	15		100,00	100,00	0,00	Tahun 2018 capaian kinerja ada pada Kesbangpol
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3				11	12	13	12	20,92	11	109,09	174,33	84,62	Tahun 2018 capaian kinerja pada triwulan II
3	Persentase Pos Siskamling yang berfungsi				75	80	80	100	100	80	133,33	125,00	100,00	Tahun 2018 capaian kinerja pada triwulan II
4	Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas				5	6	7	12,12	37,58	15	242,40	626,33	214,29	Tahun 2018 capaian kinerja pada triwulan II

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan Kondisi geografis wilayah kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan ibukota serta beberapa wilayah lain antara lain kota Bogor, Depok dan Kabupaten Bekasi serta jumlah penduduk Kota Bekasi yang cenderung meningkat secara otomatis akan membawa dampak terhadap munculnya masalah-masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtrantibmas di wilayah kota Bekasi mulai dari kebutuhan lahan pemukiman, penyakit masyarakat seperti Perjudian, Miras dan PSK, masalah sosial lain yang dilatar belakangi oleh ekonomi seperti banyaknya pedagang kaki lima (PKL), gelandangan dan pengemis (gepeng) serta aksi sosial terkait pro kontra terhadap kebijakan pemda sampai dengan konflik berlatar belakang keagamaan menempatkan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat Satpol PP kedalam posisi yang cukup penting sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu Satuan daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib terkait dengan berbagai gambaran kondisi diatas maka diperlukan suatu komitmen dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku serta dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Namun secara garis besar beberapa permasalahan yang menjadi issue penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban adalah :

1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, kecepatan, ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
2. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat.
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP.

Untuk itu rekomendasi strategis yang dapat disampaikan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut antara lain :

1. Aspek regulasi, yaitu penguatan terhadap kapasitas kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan baik tingkat kota maupun kecamatan.
2. Aspek sumber daya manusia dalam hal ini jumlah personil serta kualitas aparatur.
3. Aspek sarana dan prasarana yaitu terkait dengan kelengkapan aparatur maupun kebutuhan sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Aspek Pembiayaan yaitu terkait dengan anggaran pendukung operasional kegiatan maupun peningkatan kesejahteraan aparatur satpol pp.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan. Serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan renja SKPD untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama.

Persandingan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota BeKasi

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
				SATUAN	TARGET					SATUAN	TARGET		
01.05.19	Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi	1. Rasio perlindungan masyarakat	%	100	19.828.300.000	Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1. Rasio perlindungan masyarakat	%	100	18.608.300.000	
			2. Persentasi Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100				2. Persentasi Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100		
1	Penyelenggaraa n Satuan Perlindungan Masyarakat se-Kota Bekasi		Jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kota Bekasi	Orang	1736	15.550.000.000	Penyelenggara an Satuan Perlindungan Masyarakat se-Kota Bekasi		Jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kota Bekasi	Orang	1736	14.330.000.000	
			Jumlah penyaluran Honor Bagi Anggota Satlinmas Se-Kota Bekasi	Bulan	12				Jumlah penyaluran Honor Bagi Anggota Satlinmas Se-Kota Bekasi	Bulan	12		
			Jumlah penyaluran Beras Bagi Anggota Satlinmas Se-Kota Bekasi	Bulan	12				Jumlah penyaluran Beras Bagi Anggota Satlinmas Se-Kota Bekasi	Bulan	12		

		Jumlah Laporan Bulanan Anggota Satlinmas Kota Bekasi	Dokumen	12			Jumlah Laporan Bulanan Anggota Satlinmas Kota Bekasi	Dokumen	12		
2	Pengembangan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pembinaan Anggota Satlinmas	Orang	806	200.000.000	Pengembangan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pembinaan Anggota Satlinmas	Orang	806	200.000.000	
3	Perbantuan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas Perbantuan di Tiap lokasi Bencana	Orang	10	65.000.000	Perbantuan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas Perbantuan di Tiap lokasi Bencana	Orang	10	65.000.000	
4	Penyelenggaraan Peningkatan Keamanan di Lingkungan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan keamanan dilingkungan masyarakat	Orang	560	345.300.000	Penyelenggaraan Peningkatan Keamanan di Lingkungan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan keamanan dilingkungan masyarakat	Orang	560	345.300.000	
5	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengamanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Lingkungan	Jumlah Laporan Sistem Keamanan Swakarsa Di Lingkungan Masyarakat	Laporan	12	250.000.000	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengamanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Lingkungan	Jumlah Laporan Sistem Keamanan Swakarsa Di Lingkungan Masyarakat	Laporan	12	250.000.000	
		Jumlah Sarana Dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan Di Masyarakat	Paket	1			Jumlah Sarana Dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan Di Masyarakat	Paket	1		

6	Penyelenggaraan HUT Satpol PP dan Linmas	Jumlah HUT Satpol PP dan Linmas Kota Bekasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	265.000.000	Penyelenggaraan HUT Satpol PP dan Linmas	Jumlah HUT Satpol PP dan Linmas Kota Bekasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	265.000.000
		Jumlah partisipasi Dalam Rangka HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Provinsi	Kegiatan	1			Jumlah partisipasi Dalam Rangka HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	
7	Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Jumlah Pelatihan Kesemampuan Aparatur Satpol PP	Kegiatan	1	500.000.000	Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Jumlah Pelatihan Kesemampuan Aparatur Satpol PP	Kegiatan	1	500.000.000
8	Operasi Gabungan K3	Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Kali	30	400.000.000	Operasi Gabungan K3	Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Kali	30	400.000.000
		Jumlah Penertiban Tempat Hiburan dan Panti Pijat (THPP)	Kali	12			Jumlah Penertiban Tempat Hiburan dan Panti Pijat (THPP)	Kali	12	
		Jumlah Operasi Cipta Kondisi (Cipkon)	Kali	30			Jumlah Operasi Cipta Kondisi (Cipkon)	Kali	30	
9	Penertiban Penyakit Masyarakat	Jumlah Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kegiatan	62	330.000.000	Penertiban Penyakit Masyarakat	Jumlah Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kegiatan	62	330.000.000
10	Pengamanan Unjuk Rasa	Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa di Kota Bekasi	Kali	36	500.000.000	Pengamanan Unjuk Rasa	Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa di Kota Bekasi	Kali	36	500.000.000

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

11	Pengamanan Car Free Day	Jumlah Pengamanan Car Free Day (CFD)	Kali	47	350.000.000	Pengamanan Car Free Day		Jumlah Pengamanan Car Free Day (CFD)	Kali	47	350.000.000	
12	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Jumlah Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Kali	80	673.000.000	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan		Jumlah Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Kali	80	673.000.000	
13	Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS	Jumlah laporan Kasus Pelanggaran Perda	Dokumen	4	400.000.000	Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS		Jumlah laporan Kasus Pelanggaran Perda	Dokumen	4	400.000.000	
	Program Penegakan Perda	Persentase penegakan perda	%	5	1.300.000.000	Program Penegakan Perda		Persentase penegakan perda	%	5	1.100.000.000	
14	Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan	Jumlah papan peringatan larangan berjualan	Buah	57	300.000.000	Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan		Jumlah papan peringatan larangan berjualan	Buah	57	300.000.000	
15	Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda	Kegiatan	94	200.000.000	Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda		Jumlah Kasus Pelanggaran Perda	Kegiatan	94	200.000.000	
16	Peningkatan kemampuan peran PPNS di kota bekasi	Jumlah peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis Kinerja PPNS	Orang	65	500.000.000	Peningkatan kemampuan peran PPNS di kota bekasi		Jumlah peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis Kinerja PPNS	Orang	65	300.000.000	
17	Penyusunan naskah akademis Revisi perda no. 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Naskah Akademis Pengganti Perda Nomor 4 tahun 2013	Dokumen	1	300.000.000	Penyusunan naskah akademis Revisi perda no. 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Naskah Akademis Pengganti Perda Nomor 4 tahun 2013	Dokumen	1	300.000.000	
		JUMLAH			21.128.300.000						19.708.300.000	

Arah pembangunan Kota Bekasi tahun 2020 menekankan pada pencapaian sasaran – sasaran yang sudah ditetapkan dalam Visi dan Misi Wali Wali Kota Terpilih sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berharap menjadi Dinas yang diperhitungkan dengan permasalahan yang sangat mendasar di dalam menciptakan, memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan alasan yang kuat antara lain :

1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, kecepatan, ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
2. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Masih tingginya unjuk rasa di Kota Bekasi
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP.
6. Semakin menjamurnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, di wilayah Kota Bekasi yang menimbulkan keresahan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang serius terutama penanganan pasca dilakukan penertiban atau operasi.
7. Permasalahan di daerah perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.
8. Daerah rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta gejolak sosial karena heterogenitas masyarakat Kota Bekasi yang mayoritas bukan penduduk tetap;
9. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;
10. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
11. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN, SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum pemerintah kota Bekasi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui **Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi** yang mempunyai tugas pokok memelihara ketentraman, ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah, **Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi** dan Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam situasi yang kondusif

Tujuan dari Misi adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban. Tujuan ini diturunkan dalam sasaran operasional meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran yang dilakukan terhadap rumusan visi sebagai upaya penyederhanaan bagi pelaksanaan pencapaian visi melalui implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki keinginan kuat untuk mengimplementasikan Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2018 yaitu:

**“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA
DAN IHSAN”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan

Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke 5 (**lima**) yakni “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman”

Untuk mewujudkan misi ke 5 pembangunan Kota Bekasi Periode 2018-2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai pada tahun 2019, sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Bekasi

Sasaran :

Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan situasi dan kondisi tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial, beragama dan bermasyarakat dan dalam upaya untuk mencapai sasaran indikator kinerja utama tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun rencana program kerja kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan tahun 2018.

A. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi

Dalam rangka menunjang prioritas pembangunan Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja turut berperan serta mewujudkan program prioritas pembangunan Kota Bekasi sebagai berikut :

- a. Pengembangan **“urban tourism”** untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
- b. Pengembangan **creative society** melalui penyelenggaraan *event* **“BEKASI CREATIVE”** di tingkat kota dan kecamatan.
- c. Pengembangan **Sistem Layanan Sosial Terpadu** (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
- d. Pengembangan **kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike)**;
- e. Penambahan dan pemeliharaan **taman-taman kota bernuansa tema tertentu** (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);
- f. Penataan dan pengendalian **estetika papan reklame** (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
- g. **Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi** untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;
- h. Penanggulangan banjir melalui penerapan **penanganan banjir berwawasan lingkungan (eco drainage)**;
- i. Pengelolaan event **“car free day”** yang berkontribusi terhadap **promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan**;

B. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja :

Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan, Jumlah Pagu Rp. **35.656.800.000,-** (Tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh ena juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
11. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15. Pendidikan dan Pelatihan Formal
16. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

C. Program Prioritas Belanja Langsung Urusan Satuan Polisi Pamong Praja :

Belanja Langsung Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 2 (dua) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, Jumlah Pagu Rp. **19.708.300.000,-** (Sembilan belas milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat se-Kota Bekasi
2. Pengembangan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi
3. Perbantuan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana
4. Penyelenggaraan Peningkatan Keamanan di Lingkungan Masyarakat
5. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan
6. Penyelenggaraan HUT Satpol PP dan Linmas
7. Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
8. Operasi Gabungan K3
9. Penertiban Penyakit Masyarakat
10. Pengamanan Unjuk Rasa
11. Pengamanan Car Free Day
12. Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan

13. Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS

b. Program Penegakan Perda

14. Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan

15. Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda

16. Peningkatan kemampuan peran PPNS di kota Bekasi

17. Penyusunan naskah akademis Revisi perda no. 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Rumusan Program/kegiatan tersebut apabila tidak sesuai dengan rancangan baik jenis program, kegiatan maupun pagu indikatif akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang berdampak terhadap pencapaian Visi Misi Kota Bekasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2018 yaitu:

“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota terpilih periode 2018-2023 penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum terdapat dalam Misi ke-5 (lima) yaitu **“Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”**.

Dalam rangka turut mewujudkan prioritas pembangunan kota bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja turut menunjang program prioritas pembangunan kota bekasi dalam hal memelihara Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, sebagai berikut :

- a. Pengembangan **“urban tourism”** untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
- b. Pengembangan **creative society** melalui penyelenggaraan *event* **“BEKASI CREATIVE”** di tingkat kota dan kecamatan.

- c. Pengembangan **Sistem Layanan Sosial Terpadu** (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
- d. Pengembangan **kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*)**;
- e. Penambahan dan pemeliharaan **taman-taman kota bernuansa tema tertentu** (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);
- f. Penataan dan pengendalian **estetika papan reklame** (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
- g. **Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi** untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;
- h. Penanggulangan banjir melalui penerapan **penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*)**;
- i. Pengelolaan event **“car free day”** yang berkontribusi terhadap **promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan**;

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mempunyai tugas menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
5. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Satpol PP guna melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki rencana kerja tahun 2019 total pagu sebesar Rp. 66.943.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- i. Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, Jumlah Pagu Rp. **35.656.800.000,-** (Tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh ena juta delapan ratus ribu rupiah)
- ii. Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, Jumlah Pagu Rp. **35.656.800.000,-** (Tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh ena juta delapan ratus ribu rupiah)

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir).

T.C 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
BELANJA LANGSUNG URUSAN				SATUAN	TARGET	19.708.300.000	APBD	TARGET	21.900.000.000	
I	Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan		Ratio	01 : 31	18.608.300.000		Mewujudkan Misi ke 5 RPJMD Kota Bekasi	01 : 31	20.800.000.000
		2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		%	65				65	
1	Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat se-Kota Bekasi	Jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Kota Bekasi		Orang	1736	14.330.000.000	APBD		1736	15.550.000.000
		Jumlah penyaluran Honor Bagi Anggota Satlinmas Se- Kota Bekasi		Bulan	12				12	

		Jumlah penyaluran Beras Bagi Anggota Satlinmas Se- Kota Bekasi		Bulan	12				12	
		Jumlah Laporan Bulanan Anggota Satlinmas Kota Bekasi		Dokumen	12				12	
2	Pengembangan Kemampuan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi	Jumlah Peserta Pembinaan Anggota Satlinmas		Orang	806	200.000.000	APBD		806	350.000.000
3	Perbantuan Satlinmas Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas Perbantuan di Tiap lokasi Bencana		Orang	10	65.000.000	APBD		10	150.000.000
4	Penyelenggaraan Peningkatan Keamanan di Lingkungan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan keamanan dilingkungan masyarakat		Orang	560	345.300.000	APBD		560	300.000.000
4	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengamanan Ketertiban dan Ketertiban Umum di Lingkungan	Jumlah Laporan Sistem Keamanan Swakarsa Di Lingkungan Masyarakat		Laporan	12	250.000.000	APBD		12	350.000.000
5		Jumlah Sarana Dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan Di Masyarakat		Paket	1				1	
6	Penyelenggaraan HUT Satpol PP dan Linmas	Jumlah HUT Satpol PP dan Linmas Kota Bekasi yang dilaksanakan		Kegiatan	1	265.000.000	APBD		1	500.000.000

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

		Jumlah partisipasi Dalam Rangka HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Provinsi		Kegiatan	1				1	
7	Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Jumlah Pelatihan Kesemaptan Aparatur Satpol PP		Kegiatan	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000
8	Operasi Gabungan K3	Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)		Kali	30	400.000.000	APBD		30	600.000.000
		Jumlah Penertiban Tempat Hiburan dan Panti Pijat (THPP)		Kali	12				12	
		Jumla Operasi Cipta Kondisi (Cipkon)		Kali	30				30	
9	Penertiban Penyakit Masyarakat	Jumlah Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT)		Kegiatan	62	330.000.000	APBD		62	450.000.000
10	Pengamanan Unjuk Rasa	Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa di Kota Bekasi		Kali	36	500.000.000	APBD		36	500.000.000
11	Pengamanan Car Free Day	Jumlah Pengamanan Car Free Day (CFD)		Kali	47	350.000.000			47	450.000.000
12	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Jumlah Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan		Kali	80	673.000.000	APBD		80	650.000.000
13	Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS	Jumlah laporan Kasus Pelanggaran Perda		Dokumen	4	400.000.000	APBD		4	450.000.000
II	Program Penegakan Perda	Persentase penegakan perda		%	5	1.100.000.000			5	1.100.000.000

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

14	Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan	Jumlah papan peringatan larangan berjualan		Buah	57	300.000.000	APBD		57	0
15	Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda		Kegiatan	94	200.000.000	APBD		94	250.000.000
16	Peningkatan kemampuan peran PPNS di kota bekasi	Jumlah peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis Kinerja PPNS		Orang	65	300.000.000	APBD		65	350.000.000
17	Penyusunan naskah akademis Revisi perda no. 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Naskah Akademis Pengganti Perda Nomor 4 tahun 2013		Dokumen	1	300.000.000	APBD		1	500.000.000
BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN						35.656.800.000				37.840.000.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	33.556.800.000				35.440.000.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Internet Air dan Listrik		Bulan	12	750.000.000	APBD			850.000.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luas bangunan yang akan di bersihkan		M2	5.952	500.000.000	APBD			600.000.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		Unit	5.124	140.000.000	APBD			150.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan		Unit	8	140.000.000	APBD			150.000.000
		Jumlah penggandaan		Lembar	103.690					
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik/penerangan bangunan		Unit	733	50.000.000	APBD			75.000.000

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan yang disediakan		Unit	237	50.000.000	APBD			100.000.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan		Exp	7.750	50.000.000	APBD			50.000.000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan		Pak	4.402	90.000.000	APBD			15.000.000
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah/ perjalanan dinas		Kali	85	200.000.000	APBD			350.000.000
10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran yang disediakan		Orang/Bulan	5.896	31.486.800.000	APBD			33.000.000.000
11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah		Kali	8 Kali	100.000.000	APBD			100.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	2.000.000.000	APBD			2.200.000.000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	luas gedung kantor		Luas	1.250	300.000.000	APBD			300.000.000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		Unit	56	1.600.000.000	APBD			1.750.000.000

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020
[Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi]

14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		Unit	230	100.000.000	APBD			150.000.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	100	100.000.000	APBD			200.000.000
15	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal		Orang	5	50.000.000	APBD			100.000.000
16	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek		Orang	5	50.000.000	APBD			100.000.000
	JUMLAH					55.365.100.000				59.740.000.000

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi program dan kegiatannya.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi para stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bekasi. Ruang lingkup perencanaan penegakan Perda dan menciptakan ketertiban serta keamanan di Kota Bekasi ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta Visi dan Misi Kota Bekasi secara keseluruhan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas upaya penyeragaman dan penyamaan persepsi melalui komunikasi, koordinasi dan konsolidasi internal mutlak diperlukan sehingga pencapaian target kinerja bukan

hanya tanggungjawab Kepala SKPD selaku pimpinan satpol PP melainkan seluruh jajaran pemangku jabatan di setiap bidang beserta staf yang ada dibawahnya. Segala kekurangan diharapkan selalu menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk selanjutnya bisa mencapai hasil yang maksimal.

Bekasi,


KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
Drs. ABI HURAIKAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660103 198603 1 012